

Retret Kepala Daerah: 49 Tak Hadir Tanpa Kabar, Diduga dari PDIP

Category: Nasional, News

written by Redaksi | 21/02/2025



ORINEWS.id – Pelaksanaan retret kepala daerah di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah saat ini sudah dihadiri 448. Mereka telah mendaftar kepada panitia penyelenggara dan bersedia mengikuti acara hingga selesai.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa dari 448 kepala daerah yang hadir langsung melakukan tes pemeriksaan kesehatan.

“Dari 448 yang hadir itu, 19 harus kami beri tanda gelang merah karena kondisi fisiknya harus mendapat atensi seperti pasca operasi, karena mereka memaksa ikut,” ucap Wamendagri kepada wartawan di Magelang, Jumat, 21 Februari 2025.

Lanjut dia, dari seluruh kepala daerah ada 55 yang hingga kini belum hadir. 6 kepala daerah di antaranya telah konfirmasi atau meminta izin tidak bisa hadir karena sakit serta acara keluarga.

“Ada 55 yang tidak hadir. Dari 55 itu ada 6 telah menyampaikan surat izin kepada panitia, 5 karena sakit dan ada yang acara keluarga sehingga tidak bisa mengikuti rangkaian acara. 47

belum ada kabar, dua baru hadir,” jelasnya.

Mantan Walikota Bogor itu menyatakan bagi kepala daerah yang tidak bisa hadir diminta untuk mengirim perwakilannya.

“Harus ada yang menggantikan kepala daerah yang tidak hadir. Bagi yang diizinkan tidak hadir penting mengirimkan wakilnya untuk hadir. Untuk yang tidak ada kabar kami masih menunggu apakah datangnya terlambat atau ada hal lain,” ungkapnya.

Masih kata Bima, retreat ini merupakan acara penting yang harus dilakukan kepala daerah. Selain sebagai ajang silaturahmi, retreat ini juga untuk menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah.

“Presiden [Prabowo](#) mengingatkan pentingnya acara ini. Kami baru menerima data secara mentah, bisa saja yang tidak ada kabar ini dari latar belakang manapun. Panitia akan terus menghubungi yang 49 ini. Malam ini kami putuskan mana yang bisa mengirimkan wakil, mana yang tidak bisa hadir,” pungkasnya.

Diduga 49 kepala daerah yang tanpa kabar itu merupakan kader [PDIP](#). Pasalnya, pelaksanaan retreat ini sempat diwarnai aksi penundaan keberangkatan kepala daerah yang berasal dari PDIP.

Hal itu sesuai instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025.

Surat itu ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP, Megawati meminta agar perjalanan menuju retreat tersebut ditunda.

Instruksi itu diterbitkan menyikapi dinamika [Politik](#) nasional, termasuk kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, yang tengah menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi ([KPK](#)).[]